

Implementasi Blended Finance sebagai Alternatif Pendanaan bagi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Moreno Paskala Firdaus

Universitas Padjadjaran, Indonesia

Alamat: Jln. Ir. Soekarno km. 21 Jatinangor, Kab. Sumedang

Korespondensi penulis: moreno.pf27@gmail.com

Abstract. *Indonesia Eximbank (LPEI), as a state-owned enterprise under the Ministry of Finance, has a primary focus on export financing. However, LPEI is currently facing challenges in implementing sustainable finance. Sustainable finance is part of the environmental, social, and governance (ESG) roadmap aimed at achieving the 17 Sustainable Development Goals (SDGs). To address these challenges, this report aims to provide a financing alternative aligned with ESG principles. Blended finance was chosen as an appropriate alternative due to its inclusive and collaborative principles, which align with sustainable finance. Additionally, blended finance is expected to address the investment gap in the sustainable sector. By applying this scheme, LPEI can enhance its contribution to ESG implementation while expanding financing access for more exporters.*

Keywords: *Blended Finance; ESG; LPEI; and SDGs*

Abstrak. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), sebagai BUMN di bawah Kementerian Keuangan, memiliki fokus utama pada pembiayaan ekspor. Namun, saat ini LPEI menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan keuangan berkelanjutan. Keuangan berkelanjutan merupakan bagian dari peta jalan environmental, social, and governance (ESG) yang bertujuan untuk mencapai 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Untuk mengatasi tantangan tersebut, laporan ini bertujuan menyajikan alternatif pembiayaan yang sejalan dengan prinsip ESG. Blended finance dipilih sebagai alternatif yang tepat karena mengusung prinsip inklusivitas dan kolaborasi yang selaras dengan keuangan berkelanjutan. Selain itu, blended finance diharapkan mampu menjawab masalah kesenjangan investasi di sektor berkelanjutan. Dengan menerapkan skema ini, LPEI dapat meningkatkan kontribusinya dalam penerapan ESG sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi lebih banyak eksportir.

Kata kunci: *Blended Finance; ESG; LPEI; dan SDGs*

1. LATAR BELAKANG

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), yang didirikan sebagai Special Mission Vehicle (SMV), memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan ekspor melalui layanan keuangan, seperti pembiayaan ekspor, jaminan, dan mitigasi risiko perdagangan. Layanan ini sangat vital bagi usaha kecil dan menengah (UKM) yang sering menghadapi kesulitan dalam memperoleh pendanaan dari bank komersial. Namun, LPEI beroperasi di bawah batasan hukum yang melarangnya menghimpun dana melalui simpanan publik, sehingga harus mengandalkan operasi bisnis, utang, dan hibah dari pemerintah sebagai sumber pendanaan. Keterbatasan ini mengakibatkan kendala likuiditas, yang tercermin dalam rasio pinjaman terhadap simpanan (LDR) LPEI, yang secara konsisten melampaui ambang batas 92% yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Meskipun ada upaya berkelanjutan untuk menurunkan rasio kredit bermasalah (NPL), rasio NPL LPEI tetap berada di atas rata-rata perbankan nasional sebesar 2,5%, yang

memperburuk tantangan likuiditas dan membatasi kemampuan LPEI untuk menyalurkan dana tambahan. Untuk mengatasi keterbatasan finansial ini, LPEI dapat mempertimbangkan adopsi blended finance sebagai mekanisme pendanaan alternatif. Blended finance menggabungkan modal konsesional dan swasta untuk mendukung proyek-proyek berkelanjutan, sesuai dengan POJK No. 51/2017 yang mendorong penerapan prinsip keuangan berkelanjutan di lembaga keuangan.

Penerapan blended finance dapat memperkuat kapasitas pendanaan LPEI untuk proyek-proyek ekspor berkelanjutan, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap kriteria Environmental, Social, and Governance (ESG) serta Sustainable Development Goals (SDGs). Contoh penerapan blended finance yang sukses di tingkat internasional termasuk program ekspor tanaman kayu di Ghana, yang meningkatkan produksi ekspor melalui kombinasi pendanaan publik dan swasta. Di Indonesia, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) telah menerapkan blended finance dalam proyek transisi energi, seperti Titab Mini Hydro di Bali, yang membuktikan potensi model ini dalam mendukung pertumbuhan berkelanjutan, akses energi yang merata, dan penciptaan lapangan kerja.

Dengan mengintegrasikan blended finance ke dalam kerangka operasionalnya, LPEI dapat memperoleh likuiditas yang sangat dibutuhkan dan memperluas kapasitasnya dalam membiayai proyek ekspor yang bersifat non-bankable. Walaupun penerapan blended finance masih relatif baru di Indonesia dan lebih banyak diterapkan oleh PT SMI, model ini menawarkan peluang besar bagi LPEI untuk meningkatkan aktivitas pembiayaan ekspor dan mengatasi tantangan pendanaan yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk melanjutkan studi yang dilakukan oleh Derry Wanta mengenai konsep blended finance. Dalam studinya, Wanta membahas konsep blended finance serta preseden penerapannya pada berbagai lembaga yang telah mengadopsinya. Penelitian ini mencoba mengembangkan lebih lanjut penerapan konsep tersebut pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), yang berfokus pada pembiayaan ekspor. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang potensi penerapan blended finance di luar pembiayaan proyek pembangunan, khususnya dalam industri ekspor.

2. KAJIAN TEORITIS

Blended Finance

Istilah blended finance pertama kali diperkenalkan dalam Addis Ababa Action Agenda (AAAA) yang disusun di Addis Ababa, Ethiopia, pada 13-16 Juli 2021 (Wanta, Felita, and

Noviantoro 2022). Dokumen ini menjelaskan bahwa blended finance merupakan bentuk kemitraan antara pemerintah, sektor publik, dan swasta untuk mengurangi risiko dalam proyek-proyek pemerintah yang bertujuan mencapai pembangunan berkelanjutan (OECD 2021).

Meskipun istilah blended finance telah lama disebutkan dalam dokumen tersebut, definisinya masih belum sepenuhnya jelas. Menurut Klein, blended finance adalah pendanaan yang menggabungkan keuangan publik dan swasta, namun tidak melibatkan subsidi pemerintah. Sedangkan menurut organisasi European Thinktanks, blended finance yang dikelola oleh fasilitas Uni Eropa memadukan pinjaman dan hibah. Pendekatan ini melibatkan kombinasi antara pinjaman pasar (non-konsesional) dengan komponen hibah (konsesional) dalam berbagai bentuk.

Dalam blended finance, terdapat instrumen keuangan yang digunakan sebagai sumber pendanaan, yang terbagi menjadi instrumen konsesional dan non-konsesional. Menurut Jung, terdapat empat jenis instrumen keuangan yang dapat digunakan dalam struktur pembiayaan blended finance, yaitu:

- a. Hibah: Pendanaan dalam bentuk tunai tanpa ada kewajiban hukum untuk mengembalikannya sebagai utang.
- b. Instrumen Hutang: Pendanaan dalam bentuk tunai atau barang, yang menimbulkan kewajiban hukum sebagai utang. Bentuknya bisa berupa pinjaman, surat berharga, obligasi, dan lainnya.
- c. Jaminan: Perjanjian pembagian risiko pada proyek pendanaan, di mana penjamin setuju untuk menggantikan pemberi pinjaman sebagian atau seluruh jumlah pinjaman, ekuitas, atau instrumen lainnya jika peminjam gagal memenuhi kewajibannya.
- d. Mezzanine: Instrumen pendanaan yang menggabungkan elemen utang dan ekuitas.

Blended Finance Indonesia

Indonesia mulai memberikan perhatian lebih terhadap konsep blended finance sejak diperkenalkannya tujuan global baru, yaitu Sustainable Development Goals (SDGs). Salah satu inisiator utama dalam menerapkan konsep ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yang mengimplementasikannya melalui SDGs Financing Hub. Inisiatif ini bertujuan untuk memfasilitasi pembiayaan dari berbagai sumber, seperti anggaran pemerintah, donor atau filantropi, serta pelaku komersial (Wanta et al. 2022).

Selain Bappenas, Pemerintah Indonesia juga merespons kebutuhan pencapaian SDGs dengan menerbitkan Peta Jalan SDGs Indonesia. Dokumen ini menegaskan pentingnya pembiayaan berkelanjutan sebagai dasar untuk hampir semua target pembangunan, mulai dari

penghapusan kemiskinan dan kelaparan, peningkatan kualitas pendidikan, penyediaan energi bersih dan berkelanjutan, hingga berbagai aspek pembangunan lainnya.

Salah satu cara untuk menilai kontribusi investasi berkelanjutan terhadap masyarakat adalah dengan mengintegrasikan faktor Environmental, Social, and Governance (ESG) ke dalam strategi investasi. Kementerian Keuangan telah mengambil langkah untuk menerapkan prinsip-prinsip ESG dalam dukungan dan fasilitas pemerintah, terutama untuk pembiayaan infrastruktur, guna membantu mencapai target SDGs.

Upaya ini diimplementasikan melalui program SDGs Indonesia One, yang dikelola oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Proyek-proyek di bawah SMI bersifat berkelanjutan dan berfokus pada pencapaian SDGs. SDGs Indonesia One menyediakan berbagai fasilitas pendanaan, termasuk pengembangan, de-risking, pembiayaan, dan dana ekuitas (Djajawinata 2020). SMI berperan sebagai penyedia pembiayaan serta pelaksana proyek infrastruktur, dengan fokus pada proyek-proyek percontohan untuk menunjukkan potensi keberhasilan investasi di sektor infrastruktur.

Selain SMI, Lembaga Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) juga turut berperan dalam menjamin proyek-proyek infrastruktur berkelanjutan. Dengan memberikan jaminan, PII bertujuan untuk mengurangi risiko dan menarik minat investor swasta agar berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur. Melalui peran masing-masing, SMI dan PII bekerja sama untuk memfasilitasi pembangunan infrastruktur berkelanjutan dengan model pembiayaan yang inklusif.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan meninjau literatur yang relevan, termasuk laporan yang dipublikasikan, dokumen kebijakan, dan literatur akademik mengenai mekanisme pembiayaan untuk pembangunan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa LPEI memiliki sumber daya yang memadai serta prosedur kerja yang efektif dalam menerapkan skema blended finance sebagai bagian dari strategi pembiayaan berkelanjutan. Oleh karena itu, studi ini mencakup aspek-aspek penting seperti perencanaan strategis, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan pengembangan produk pembiayaan berkelanjutan yang akan diimplementasikan (OECD, 2016). Peneliti juga memanfaatkan VOSviewer untuk menganalisis keselarasan diskusi mengenai blended finance dengan preseden penelitian sebelumnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Preseden Penerapan Blended Finance di Indonesia

Berikut ini penjelasan untuk Sub judul kesatu. Sebelum memberikan pembiayaan, LPEI memperhatikan historikal dan reciprocal dari suatu proyek untuk mengidentifikasi potensi risiko di masa depan. Dengan memahami keberhasilan atau kegagalan proyek serupa, LPEI dapat mengambil langkah strategis dalam pengelolaan risiko dan meningkatkan peluang kesuksesan. Reciprocal juga penting untuk menilai kerjasama sebelumnya dan mengukur risiko yang mungkin timbul. Salah satu contoh sukses penerapan blended finance di Indonesia adalah SMI, yang secara konsisten meluncurkan program keberlanjutan dan melaporkannya melalui laporan keberlanjutan kuartalan. Di tingkat internasional, GCA dari Belanda telah menerapkan blended finance untuk mendukung ekspor di Ghana yang terdampak perubahan iklim, dengan pendanaan sebesar 200 juta dolar dan bantuan teknis, sejalan dengan program Desa Devisa LPEI yang mendorong ekspor produk lokal.

Berdasarkan data VOSviewer, blended finance memiliki hubungan erat dengan pengentasan financing gap terutama untuk proyek-proyek yang bersifat non-bankable. Hal ini penting karena banyak program pembangunan di Indonesia, termasuk Desa Devisa, menghadapi tantangan keterbatasan akses pendanaan. Melalui blended finance, LPEI dapat memperluas akses ke pembiayaan untuk proyek yang sulit dibiayai oleh perbankan, sambil menciptakan nilai ekonomi dari sumber daya lokal dan mendorong keberlanjutan. Program ini tidak hanya memperluas peluang ekspor, tetapi juga memberdayakan masyarakat desa untuk menjadi lebih mandiri.

Perbandingan Instrumen Keuangan Berkelanjutan

Penerapan keuangan berkelanjutan merupakan kepatuhan lembaga keuangan terhadap misi negara dalam POJK No. 51, yang mengarahkan institusi keuangan agar sejalan dengan roadmap mereka. Terdapat empat instrumen utama: portofolio hijau, global sustainability bond, green and gender bond, serta blended finance.

Portofolio hijau berfokus pada pengelolaan risiko lingkungan, termasuk perubahan iklim, regulasi lingkungan, dan risiko reputasi dari investasi yang tidak ramah lingkungan. Namun, LPEI menghadapi tantangan karena portofolio investasinya, yang didominasi sektor pertambangan, tidak memenuhi kriteria keberlanjutan. Selain itu, LPEI belum melaporkan laporan keberlanjutan sesuai standar PRI, CBI, atau POJK.

Global Sustainability Bond dan Green and Gender Bond adalah instrumen keuangan yang diterbitkan untuk mendukung proyek-proyek berkelanjutan. Global Sustainability Bond

mencakup berbagai proyek yang mendukung keberlanjutan secara menyeluruh, meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Green and Gender Bond, di sisi lain, berfokus pada proyek ramah lingkungan dan inisiatif yang mendukung kesetaraan gender (Brears, 2022.). Dana dari kedua obligasi ini dialokasikan untuk proyek-proyek sesuai kriteria masing-masing dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Namun, dalam kondisi saat ini, penerbitan obligasi bukan langkah yang tepat bagi LPEI, karena obligasi termasuk “dana mahal” dengan imbal hasil tinggi yang harus dibayarkan kepada investor. Saat ini, LPEI tengah melakukan buyback bonds untuk mengurangi total utang dan beban bunga (Toarik, 2023). Oleh karena itu, menerbitkan obligasi baru tidak sejalan dengan upaya LPEI dalam merestrukturisasi portofolio dan mengelola utang yang ada, sehingga fokusnya sebaiknya diarahkan pada penguatan posisi keuangan sebelum mempertimbangkan penerbitan obligasi baru.

Dibandingkan dengan tiga instrumen sebelumnya, blended finance bisa menjadi solusi bagi LPEI dalam mengatasi keterbatasan penerapan instrumen-instrumen tersebut. Blended finance adalah skema pembiayaan yang menggabungkan dana dari sektor publik dan swasta, memungkinkan LPEI mengakses sumber dana yang lebih beragam. Melalui pendekatan ini, LPEI dapat memperoleh hibah tambahan, yang berpotensi menekan biaya dan meningkatkan efisiensi keuangan. Data dari VOSviewer menunjukkan bahwa blended finance memiliki keterkaitan dengan sektor seperti pembangunan berkelanjutan, financing gap, dan dana filantropi, yang semuanya relevan dengan upaya LPEI untuk mencapai pembiayaan inklusif dan biaya dana yang lebih rendah. Ini menunjukkan bahwa LPEI berpeluang memanfaatkan blended finance untuk memperluas akses ke sumber daya keuangan, sekaligus mengatasi kesenjangan pendanaan. Selain itu, blended finance memberikan fleksibilitas lebih besar dibandingkan portofolio hijau, yang mengharuskan keberlanjutan di seluruh portofolio. Sebaliknya, pendekatan blended finance memungkinkan LPEI mendanai proyek tertentu, seperti yang terlihat dalam berbagai inisiatif blended finance yang mendukung proyek-proyek terkait SDGs.

Perencanaan Strategis Penerapan Blended Finance

Blended finance adalah pendekatan inovatif yang menggabungkan dana dari sektor publik dan swasta untuk mencapai SDGs. VOSviewer menunjukkan keterkaitan antara SDGs dan blended finance, yang memungkinkan mobilisasi sumber daya lebih besar untuk proyek-proyek berdampak sosial dan lingkungan, namun kurang menarik bagi investor komersial

murni (OECD 2018). Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara tujuan pembangunan berkelanjutan dan pengembalian investasi yang menarik.

Blended finance mendorong kolaborasi antara lembaga komersial yang berkomitmen terhadap keberlanjutan dan proyek-proyek berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Untuk mewujudkan pembiayaan berkelanjutan, LPEI telah menyusun kerangka kerja strategis yang mengintegrasikan SDGs. Kerangka ini mencakup pemetaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang relevan, perancangan mekanisme pendanaan berkelanjutan, serta pembentukan unit kerja khusus untuk mengelola pipeline sesuai prinsip keberlanjutan.

LPEI perlu menguraikan produk inti mereka untuk mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan lebih efektif. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2009, produk LPEI terbagi menjadi tiga kategori: komersial, national interest account, dan technical assistance. Produk komersial mencakup pendanaan eksportir dan importir, seperti trade finance, letter of credit, documentary collection, asuransi, dan penjaminan. National interest account, berdasarkan Permenkeu RI No. 1/KMK.08/2019, bertujuan mempromosikan ekspor Indonesia ke negara-negara Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah. Technical assistance berfokus pada pelatihan calon eksportir dan pengembangan program desa devisa. Pemetaan SDGs terhadap produk LPEI dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Berdasarkan pemetaan SDGs dalam tabel pendanaan, terdapat beberapa pola utama dalam fokus pendanaan LPEI. Pendanaan LPEI menunjukkan korelasi kuat dengan SDGs 5 (Kesetaraan Gender) dan SDGs 8 (Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan), menunjukkan prioritas pada pertumbuhan ekonomi inklusif dan pemberdayaan perempuan. Selain itu, SDGs 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur) dan SDGs 12 (Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab) menunjukkan komitmen terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan lingkungan yang bertanggung jawab. Pendanaan juga mendukung SDGs 10 (Mengurangi Ketimpangan), memastikan manfaat pembangunan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pemetaan ini mengindikasikan bahwa setiap jenis pendanaan LPEI seringkali mendukung beberapa tujuan SDGs secara bersamaan, mencerminkan pendekatan komprehensif dalam mengatasi tantangan pembangunan.. Temuan dari VOSviewer juga mengungkap keterkaitan blended finance dengan perencanaan bisnis yang tepat guna, menekankan pentingnya menguraikan proses pembiayaan secara rinci untuk memastikan kesiapan dalam merencanakan pembiayaan berkelanjutan (LPEI, Co-Financing & Penjaminan Kredit dengan Bank, 2023).

Tahapan dalam penerapan blended finance oleh LPEI dimulai dengan piloting, yaitu persiapan awal untuk meninjau pipeline proyek berkelanjutan yang dapat membuka akses pendanaan eksternal, khususnya melalui platform SDGs Indonesia One. Tahap underwriting kemudian berfokus pada penilaian risiko proyek, memastikan kelayakan finansial dan kesesuaian dengan prinsip keberlanjutan. Proses ini membantu memitigasi risiko, sehingga para pemangku kepentingan lebih percaya diri dalam mengalokasikan dana.

Propose, atau pemasaran proyek, bertujuan untuk menarik pemodal yang tertarik pada pembiayaan berkelanjutan, difasilitasi oleh platform SDGs Indonesia One yang memperluas akses ke investor yang berfokus pada ESG. Setelah itu, perjanjian pembiayaan mencakup rincian penting seperti struktur pendanaan, komitmen pihak terkait, serta kontribusi sumber dana. Monitoring menjadi langkah akhir, memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan perjanjian, serta memenuhi prinsip keberlanjutan yang diharapkan.

Dengan proses yang sistematis ini, LPEI dapat mengakses platform SDGs Indonesia One, terhubung dengan calon mitra yang sejalan dengan fokus keberlanjutan mereka, seperti pemberdayaan desa untuk tujuan ekspor. Akses ini membantu LPEI mengatasi financing gap yang ada. Informasi dari VOSviewer juga menunjukkan bahwa perencanaan bisnis yang tepat, sejalan dengan prinsip blended finance, dapat mendukung pencapaian SDGs. Melalui model bisnis yang relevan, LPEI bisa berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, memperkuat posisi mereka dalam pembiayaan proyek-proyek berkelanjutan, dan mengatasi kesenjangan pendanaan yang dihadapi.

Kapasitas Kelembagaan LPEI

Saat ini, LPEI belum sepenuhnya memenuhi syarat sebagai lembaga pembiayaan berkelanjutan karena belum menyusun laporan keberlanjutan, sebuah elemen penting sesuai mandat POJK No. 51. Laporan ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga menunjukkan komitmen lembaga terhadap prinsip-prinsip pembiayaan berkelanjutan. Tanpa laporan ini, LPEI belum dapat membuktikan keselarasan dengan standar internasional terkait praktik keuangan yang bertanggung jawab, serta menghambat akses mereka terhadap investor ESG.

Laporan keberlanjutan ini harus terpisah dari laporan keuangan tahunan, dan untuk itu diperlukan divisi khusus yang bertanggung jawab mengelola infrastruktur pembiayaan berkelanjutan. Divisi ini akan berperan sebagai relationship manager dengan donor dan pemangku kepentingan, memastikan proyek memenuhi kriteria donor, serta bertanggung jawab menyusun laporan yang diperlukan terkait kelayakan lingkungan proyek. Divisi ini juga mengembangkan kebijakan dan prosedur terkait pengendalian dampak lingkungan,

mengidentifikasi risiko lingkungan, serta mengintegrasikan kebijakan keberlanjutan ke dalam strategi perusahaan.

Pembentukan divisi keberlanjutan ini juga membantu LPEI mengatasi kendala struktural, seperti (LPEI, Co-Financing & Penjaminan Kredit dengan Bank, 2023) keterbatasan dalam mengakses dana murah, yang dimiliki oleh bank umum. Divisi ini dapat mendukung LPEI dalam mengakses sumber pendanaan baru, termasuk melalui platform SDGs Indonesia One dan development banks, yang menawarkan biaya pembiayaan lebih rendah untuk proyek berkelanjutan. Dengan penguatan kapasitas kelembagaan ini, LPEI akan lebih mampu menarik dana melalui pendekatan blended finance, termasuk dari dana filantropi, serta membangun kemitraan strategis untuk mendanai proyek-proyek yang memberikan dampak positif.

Produk Pembiayaan

Blended finance adalah strategi pembiayaan yang menggabungkan sumber dana dari sektor publik, swasta, dan filantropi untuk mendukung proyek-proyek pembangunan berkelanjutan. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah menarik investasi swasta ke dalam proyek yang memiliki dampak sosial dan lingkungan positif, tetapi dianggap kurang menarik secara finansial (less bankable). Blended finance umumnya menggunakan tiga jenis fasilitas: pengembangan, de-risking, dan pembiayaan (SMI, 2023).

Pertama, fasilitas pengembangan mendukung tahap awal persiapan proyek melalui hibah, bantuan teknis, pinjaman, dan ekuitas untuk meningkatkan kelayakan proyek dan memobilisasi pendanaan. Kedua, fasilitas de-risking berfungsi untuk mengurangi risiko kredit dan meningkatkan kelayakan proyek dengan menyediakan peningkatan kredit (credit enhancement) dan hibah yang dapat dikembalikan (reimbursable grant). Terakhir, fasilitas pembiayaan menawarkan pinjaman, ekuitas, serta skema pembiayaan bersama (co-financing) untuk proyek yang telah layak secara komersial. Ketiga fasilitas ini saling melengkapi dan membentuk kerangka blended finance, memudahkan sektor swasta dalam menilai kapasitas dan risiko, serta memilih fasilitas yang paling tepat untuk terlibat dalam pembiayaan proyek tersebut.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hingga saat ini, LPEI belum sepenuhnya memenuhi kapasitas untuk mematuhi ketentuan dalam POJK No 51/2017 terkait pembiayaan berkelanjutan. Ada sejumlah tantangan yang harus diatasi oleh LPEI agar dapat menerapkan prinsip-prinsip pembiayaan berkelanjutan secara efektif. Meskipun demikian, blended finance merupakan salah satu dari empat alternatif

pembiayaan berkelanjutan yang direkomendasikan oleh OJK yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan LPEI saat ini.

Blended finance menawarkan fleksibilitas dan peluang bagi LPEI untuk mengakses sumber dana yang tidak hanya berasal dari sektor publik, tetapi juga sektor swasta dan filantropi. Hal ini memungkinkan LPEI untuk memperoleh dana segar yang diperlukan untuk mendukung proyek-proyek berkelanjutan, yang mungkin kurang menarik bagi investor komersial secara individual. Dengan memanfaatkan skema blended finance, LPEI dapat mengurangi risiko finansial dan meningkatkan daya tarik proyek berkelanjutan, mengingat mekanisme de-risking dan fasilitas pembiayaan yang ada dalam skema ini.

Selain itu, blended finance dapat memberikan keleluasaan bagi LPEI untuk menjangkau sumber pendanaan eksternal, termasuk platform seperti SDGs Indonesia One, yang menyediakan akses kepada mitra-mitra potensial dengan komitmen kuat terhadap keberlanjutan. Dengan adanya akses ke sumber dana ini, LPEI dapat mengatasi keterbatasan struktural dalam menggali dana murah, serta memperluas kapasitasnya untuk mendanai proyek-proyek berkelanjutan yang sejalan dengan prinsip-prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance).

Untuk mengoptimalkan penerapan blended finance, LPEI perlu memperkuat kapasitas kelembagaannya, antara lain dengan membentuk divisi khusus yang menangani aspek keberlanjutan, seperti penyusunan laporan keberlanjutan dan pengelolaan risiko lingkungan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap proyek yang dibiayai tidak hanya memenuhi kriteria finansial, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan yang diinginkan.

Dengan strategi yang tepat, blended finance dapat membantu LPEI dalam mencapai tujuan pembiayaan berkelanjutan, memperbaiki transparansi dan akuntabilitas, serta membuka akses lebih luas ke investor yang fokus pada proyek-proyek berkelanjutan. Dalam jangka panjang, penerapan blended finance yang efektif akan memperkuat posisi LPEI sebagai lembaga yang mampu mendukung keberlanjutan dan pembangunan ekonomi yang inklusif.

6. DAFTAR REFERENSI

- CEIC Data. (2023, April). Diambil kembali dari Indonesia Ratio Kredit Bermasalah: <https://www.ceicdata.com/id/indicator/indonesia/non-performing-loans-ratio>
- Indonesia, P. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor.
- Khaerunnisa, R. (2021, Desember 20). Kebutuhan pendanaan SDGs meningkat akibat pandemi. Diambil kembali dari Kebutuhan pendanaan SDGs: <https://www.antaraneews.com/berita/2596369/kebutuhan-pendanaan-sdgs-meningkat-akibat-pandemi>
- LPEI. (2021). *Laporan Keuangan*. Diambil kembali dari <https://www.indonesiaeximbank.go.id/lib/upload/report/621dd8475a4ff-lembaga-pembiayaan-ekspor-indonesia-ga-31-des-2021.pdf>
- LPEI. (2022). *Laporan Keuangan*. Diambil kembali dari <https://www.indonesiaeximbank.go.id/lib/upload/report/lapkeu-audittd-31-des-20212pdf.pdf>
- LPEI. (2023). *Laporan Keuangan*. Diambil kembali dari <https://www.indonesiaeximbank.go.id/lib/upload/report/lpei---31-desember-2023.pdf>
- SMI. (2023, Agustus 14). Pengelolaan SDG Indonesia One : Experience and Lesson Learned.
- Toarik, M. (2023, Oktober 17). *investortrust.id*. Diambil kembali dari [investortrust.id: https://investortrust.id/market/19181/eximbank-buyback-obligasi-senilai-rp-35-miliar-kuponnya-8-90](https://investortrust.id/market/19181/eximbank-buyback-obligasi-senilai-rp-35-miliar-kuponnya-8-90)
- OECD. 2016. *Financing Climate Action in Eastern Europe, the Caucasus and Central Asia*. OECD.
- OECD. 2018. *Mobilising Finance for Climate Action in Georgia*. OECD.
- AAAA. 2021. *Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for Development Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for Development Contents*.
- Brears, Robert C. n.d. *PALGRAVE STUDIES IN GREEN FINANCE Financing Nature-Based Solutions Exploring Public, Private, and Blended Finance Models and Case Studies*.
- Djajawinata, Darwin Trisna. 2020. *Experiences in Financing Clean Energy Projects in Indonesia PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Mobilizing Clean Energy Finance and Investment to Support Energy Transition*.
- Wanta, Derry, Arina Felita, and Rinto Noviantoro. 2022. "Blended Finance: Konsep & Penerapan Di Indonesia." *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 10(S1). doi: 10.37676/ekombis.v10is1.2009.

Catatan Kaki

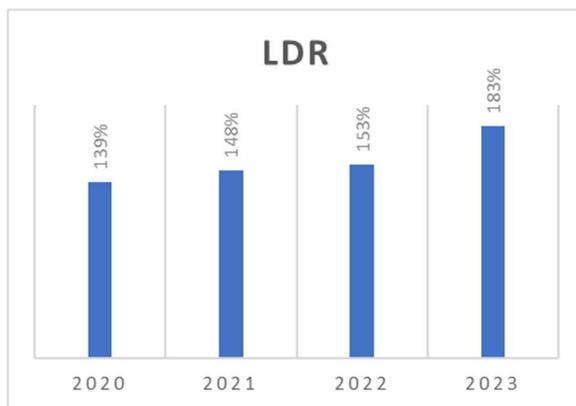
Penempatan Tabel

Tabel 1. Poin SDGs dalam Produk LPEI

| Pendanaan | | | | Non-Pendanaan | | | |
|-----------|--|---------------------------------|--|------------------------------------|--|-------------|--|
| Komersial | | National Interest Account (NIA) | | Coaching Program for New Exporters | | Desa Devias | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Sumber: Laporan Pengelolaan Sustainable Development Goals (SDGs) di PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI)

Penempatan Gambar



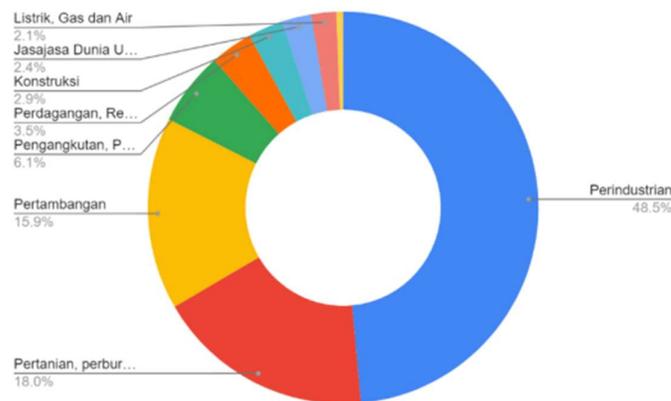
Sumber : Olahan penulis berdasarkan laporan keuangan tahunan (2020--2023)

Gambar 1. LDR Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia



Sumber : Olahan penulis berdasarkan laporan keuangan tahunan (2023)

Gambar 2. NPL Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia



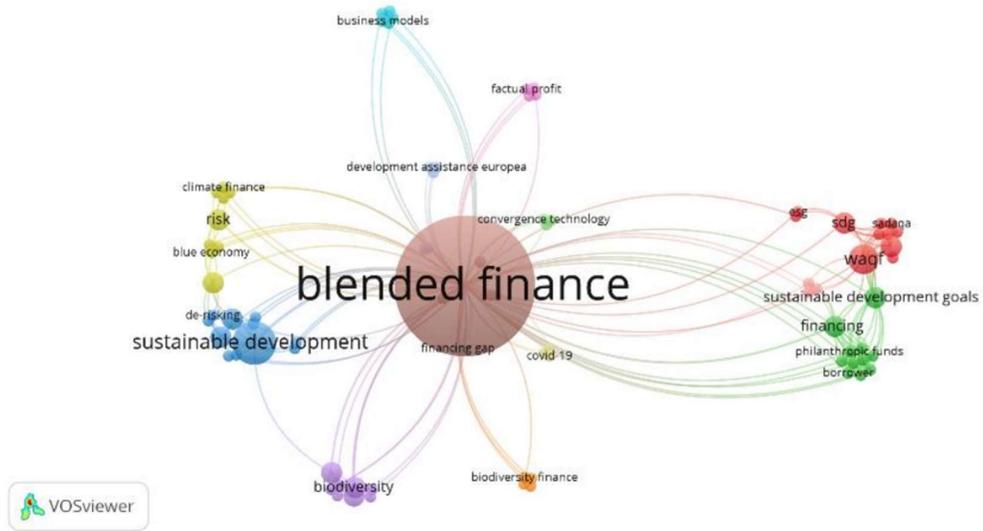
Sumber : Olahan Penulis Berdasarkan Laporan Keuangan 2023

Gambar 3. Persentase Pembiayaan LPEI di Setiap Industri



Sumber : Olahan Penulis Berdasarkan Laporan Keberlanjutan SMI 2023

Gambar 4. Proses Pembiayaan Berkelanjutan



Sumber : Olahan Penulis Melalui VosViewer

Gambar 4. VosViewer Blended Finance